

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pemberian sanksi pidana dalam dua perkara yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilu, yaitu Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn dan Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap. Kedua perkara tersebut menguji pelanggaran yang sama, yaitu pemberian suara lebih dari satu kali pada satu atau lebih TPS, yang diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif dengan pendekatan perbandingan, yang membandingkan pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa dalam kedua putusan. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan ketidakseimbangan dalam pemberian sanksi, di mana terdakwa dalam Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn dijatuhi hukuman yang lebih ringan (15 hari penjara), meskipun perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan, sementara terdakwa dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap menerima hukuman lebih berat (4 bulan penjara) yang tentunya sesuai karena terdakwa merupakan saksi partai politik yang menjadi alasan pemberat. Kesimpulannya, terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman yang dapat merugikan prinsip keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, saran yang diberikan adalah agar sistem peradilan dapat memberikan hukuman yang lebih proporsional dan konsisten, dengan memperhatikan bobot pelanggaran dan faktor-faktor yang relevan, seperti kesengajaan dan dampak dari pelanggaran tersebut, guna tercapainya keadilan yang setara.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Pemilu*

ABSTRACT

This research aims to analyze the provision of criminal sanctions in two cases related to election violations, namely Decision Number 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn and Decision Number 104/Pid.Sus/2024/PN Jap. Both cases examine the same violation, namely voting more than once at one or more polling stations, which is regulated in Article 516 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections. This research uses a normative analysis method with a comparative approach, which compares the provision of criminal sanctions against the defendant in both sentences. Based on the results of the analysis, this research found errors in giving sanctions, where the defendant in Decision Number 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn was given a lighter sentence (15 days in prison), even though his actions were carried out intentionally, while the defense attorney in Decision Number 104/Pid.Sus/2024/PN Jap received a heavier sentence (4 months in prison) which was of course appropriate because the fraudster was a witness to a political party which was the reason for the aggravation. In conclusion, there is an imbalance in law enforcement which can harm the principles of justice and consistency in the justice system. Therefore, the suggestion given is that the justice system can provide more proportional and consistent sentences, taking into account the gravity of the offense and relevant factors, such as the intent and impact of the offense, in order to achieve equal justice.

Keywords: *Punishment, Considerations Judge, Court Decision, Election Crimes*